

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi merupakan wabah penyakit dalam skala besar yang dapat meningkatkan angka kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) di cakupan wilayah yang luas dan berpotensi menyebabkan kehancuran ekonomi, sosial, dan politik (Jamison et al., 2017). Situasi pandemi dikarakteristikan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, baik secara epidemiologis, maupun retorik, sehingga berkaitan dengan efek komunikasi (Noor et al., 2020). Penyakit COVID-19, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, diidentifikasi sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* atau WHO) karena melampaui 118.000 kasus dan tersebar di lebih dari 110 negara (Ducharme, 2020). Sementara itu, Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 3 Maret 2020 (Sari, 2020). Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan politik dunia. Sebelumnya, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), atau Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia pada 30 Januari 2020. PHEIC menggambarkan sebuah situasi yang serius, tidak biasa dan tidak diperkirakan, memiliki dampak pada kesehatan masyarakat yang meresahkan dan membutuhkan gerakan internasional.

COVID-19 merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus dari famili *Coronavirus* (CoV) jenis baru, yaitu SARS-CoV-2. Penyakit ini awalnya

dikenal dengan istilah “2019-nCoV”, “novel coronavirus”, “virus corona”, dan/atau “corona” hingga WHO menetapkan nama resmi “COVID-19” pada 11 Februari 2020 (Pramudiardja, 2020). Penyakit ini pertama kali dilaporkan dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 31 Desember 2019. Setelah pelaporan tersebut, *Chinese Center for Disease Control and Prevention* (China CDC) mengirimkan tim untuk mengisolasi pasien dan mendampingi otoritas kesehatan Provinsi Hubei dan Kota Wuhan, mengontrol persebaran penyakit, juga melakukan investigasi epidemiologis dan etiologis terhadap kemunculan virus baru SARS-CoV-2 (Yue et al., 2020; Zhu et al., 2020). COVID-19 menimbulkan keresahan bagi masyarakat dunia karena memiliki dampak yang besar bagi kehidupan, antara lain kepanikan masyarakat, kekurangan persediaan medis dan pangan, kurang memadainya tenaga dan fasilitas kesehatan, dan tingginya angka orang yang bepergian (Yue et al., 2020).

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap pandemi COVID-19. Kerentanan Indonesia disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, yaitu mencapai 268 juta jiwa. Selain tingginya jumlah penduduk, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, kepadatan penduduk Indonesia juga terbilang tinggi, mencapai 52,9 persen di wilayah perkotaan (Pranita, 2020). Sebanyak 28,2 persen dari populasi masyarakat Indonesia melakukan kegiatan di luar rumah, dan menurut riset kesehatan dasar (riskesdas) hanya sebesar 49,8 persen dari masyarakat yang mempraktikkan cuci tangan dengan benar (Pranita, 2020). Jumlah, kepadatan, dan mobilitas penduduk dapat membuat COVID-19 menyebar dengan lebih cepat di Indonesia. Menurut Bank Dunia, sebanyak 115 juta orang

kategori hampir miskin dan rentan miskin di Indonesia dapat dengan mudah jatuh di bawah garis kemiskinan karena pandemi COVID-19 ini (Novika, 2020).

Sejak Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, masyarakat menilai pemerintah tidak terus terang memberikan informasi mengenai kasus COVID-19 karena menghindari kepanikan dan informasi yang simpang siur (Yunus & Rezki, 2020). Data dan informasi pemerintah mengenai jumlah kasus COVID-19 menuai kontroversi karena informasi mengenai aksi, total biaya pengeluaran pemerintah, dan total donasi tidak sesuai dengan jumlah kasus COVID-19 pada situs resmi pemerintah. Ketidaksesuaian tersebut memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah (Rezki, 2020). Tidak hanya itu, selama Januari hingga Maret 2020, telah tersebar berita-berita bohong (hoaks) di media sosial tentang COVID-19 (Rahayu & Sensusiyati, 2020). Tema hoaks yang beredar, paling banyak meliputi tema kesehatan, seperti “Ganja Mampu Menangkal Covid-19” pada 20 Maret 2020, tema bencana kesehatan, seperti “Senjata Biologis! Video ini Bukti Tentara AS Sebar Corona di Bus Wuhan” pada 20 Maret 2020, dan tema agama, seperti “Setelah tahu orang-orang Uyghur tidak tertular corona orang-orang di china berebut mendapatkan Alquran” pada 11 Maret 2020 (Tim Mapping MAFINDO, 2020). Persebaran informasi yang tidak benar, bahkan teori konspirasi, dapat memunculkan kebingungan dalam masyarakat sehingga mereka menganggap pandemi bukan masalah yang serius untuk dihadapi (Gallotti et al., 2020).

Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi merupakan hal yang krusial pada situasi pandemi. Masyarakat memiliki kecenderungan mencari informasi

untuk mengurangi ketidakpastian pada situasi pandemi. Namun, informasi yang bersifat ambigu dan masih diperdebatkan oleh berbagai pihak justru meningkatkan ketidakpastian (Sellnow et al., 2009). Ambiguitas dan perdebatan informasi meningkatkan ketidakpastian atas kebenaran sebuah fakta, meningkatkan keraguan mengenai bahaya sesungguhnya, dan mengurangi kredibilitas narasumber. Oleh karena itu, komunikasi risiko menjadi penting pada masa pandemi untuk mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas informasi (Sellnow et al., 2009). Dalam konteks pandemi, komunikasi risiko memberikan landasan untuk memperkuat dukungan dan kepercayaan masyarakat terkait ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas informasi risiko (Van Asselt & Renn, 2011).

Media massa memiliki peran penting bagi komunikasi risiko pada situasi pandemi. Melalui proses jurnalistik, media menghasilkan produk jurnalistik berupa berita yang memenuhi kebutuhan informasi masyarakat pada situasi yang tidak pasti. Media mengkonstruksi wacana mengenai penyakit-penyakit dan memberikan informasi terkait urgensi persebaran penyakit baru, penyakit menular, dan menekankan pentingnya gaya hidup sehat (Vemula & Gavaravarapu, 2016). Hubungan antara media dan pembaca merupakan aspek yang penting bagi masyarakat dalam menanggulangi situasi bencana, baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana terjadi (Perez-Lugo, 2004). Namun, peran media massa pada situasi pandemi ibarat dua sisi mata pisau. Selain memberikan informasi, media massa juga memberikan kontribusi bagi kepanikan masyarakat karena mengeksploitasi ancaman dan risiko (Ungar, 1998). Hal tersebut meningkatkan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan masyarakat dan dapat membuat

masyarakat memproteksi dirinya dengan cara yang berlebihan dan menyebarkan ketakutan berlebih pada sebuah penyakit (Vemula & Gavaravarapu, 2016).

Pandemi memiliki hampir semua kriteria nilai berita, antara lain aktual, memiliki kedekatan baik secara geografis, maupun psikologis dengan masyarakat (*proximity*), peningkatan serta penyebaran kasus yang signifikan, luas, cepat, menyangkut orang-orang penting (*prominence*), berdampak besar bagi masyarakat luas (*consequence*), dan sifatnya tidak dapat diprediksi (Vasterman & Ruigrok, 2013). Media cenderung memberitakan kemungkinan-kemungkinan paling buruk karena memiliki nilai berita lebih tinggi (Vasterman & Ruigrok, 2013). Sejak laporan kasus pertama COVID-19, media arus utama dunia dipenuhi berita mengenai COVID-19. Media berlomba-lomba mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dari berbagai sumber mulai dari asal virus, gejala-gejala yang dialami penderita, cara menghindari, cara menyembuhkan, hingga kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pada situasi pandemi COVID-19, media massa idealnya menempatkan dan memposisikan diri sesuai dengan fase bencana. Seperti pada saat pandemi A/H1N1 misalnya, pada fase pertama peringatan wabah penyakit, media massa didominasi oleh informasi yang cenderung menakutkan, mulai dari kemungkinan mutasi virus hingga penularannya (Vasterman & Ruigrok, 2013). Pada fase selanjutnya, pesan-pesan yang beredar di media massa dipenuhi oleh pesan campur, baik yang bersifat menakutkan, maupun meyakinkan. Sementara itu, pada fase ketiga, ketika wabah penyakit telah benar-benar menjadi sebuah fakta, krisis “panas”, dan penahanan krisis mendominasi media massa (Vasterman & Ruigrok,

2013). Krisis “panas” merujuk pada kondisi sebelum terjadi kepanikan masyarakat, tetapi keadaan tersebut tergantung pada kemungkinan-kemungkinan yang belum dapat diprediksi dan bagaimana kejadian tersebut dibingkai di media massa (Ungar, 1998).

Reynolds & Seeger (dalam Utomo, 2020) memaparkan lima elemen dalam proses komunikasi pada situasi krisis, yang relevan dalam membahas posisi media pada situasi krisis bencana pandemi, yaitu prakrisis, awal krisis, pemeliharaan, resolusi, dan evaluasi. Komunikasi prakrisis mengarahkan upaya-upaya untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi situasi yang akan terjadi. Pada awal krisis, komunikasi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka sedang dalam situasi krisis. Selanjutnya, pada proses pemeliharaan, komunikasi mengarah pada identifikasi kondisi yang sedang terjadi dan memikirkan strategi alternatif. Setelah itu, resolusi dilakukan jika akhir dari krisis dapat diprediksi, dan yang terakhir, evaluasi merujuk pada komunikasi tepat setelah krisis berakhir (Utomo, 2020).

Di tengah pandemi ini, media daring berperan penting untuk menyampaikan informasi terkait COVID-19. Media daring merupakan media massa yang tersaji di situs Internet (Lestari et al., 2018). Media daring memiliki keunggulan dalam kecepatan pemberitaan daripada media konvensional, yang dapat menjadi salah satu poin penting dalam peran media pada pandemi COVID-19 karena masyarakat memerlukan informasi yang cepat. Selain itu, media daring memiliki volume informasi lebih luas sehingga memungkinkan masyarakat memiliki kontrol yang lebih untuk menyeleksi informasi (Kurmia, 2005). Media

daring diharapkan dapat mengurangi dampak risiko bencana dengan menyediakan informasi mengenai mitigasi bencana karena masyarakat dapat mengakses informasi bahkan dari telepon seluler jika terhubung jaringan Internet (Lestari et al., 2018). Namun, kecepatan tersebut kerap dinilai mengorbankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme, seperti akurasi dan objektivitas, demi kecepatan pemberitaan (Abkoryah & Dewi, 2017; Juditha, 2013; Suwarno & Suryawati, 2019).

Pemberitaan COVID-19 di media daring di Indonesia memiliki kaitan erat dengan jurnalisme bencana. Jurnalisme bencana merupakan proses pencarian dan penyajian berita dan informasi mengenai bencana, baik yang disebabkan oleh alam, maupun manusia, yang telah, sedang, atau akan terjadi (Houston et al., 2019). Jurnalisme bencana penting bagi media di Indonesia pada konteks pandemi. Yang pertama, karena Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap pandemi. Yang kedua, pandemi memiliki nilai-nilai berita. Nazaruddin (2007) mengemukakan dua aspek pemberitaan bencana, yaitu aspek proses dan hasil. Aspek proses merujuk pada proses produksi berita bencana, sedangkan aspek hasil mengacu pada berita-berita bencana yang disajikan oleh media.

Jurnalisme bencana meliputi fase-fase pemberitaan bencana dan prinsip-prinsip dasar jurnalisme (Nazaruddin, 2007). Nazaruddin (2007) mengungkapkan terdapat tiga fase pemberitaan bencana, yaitu: fase prabencana, bencana, dan pascabencana. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar jurnalisme bencana meliputi prinsip akurasi, keseimbangan, martabat, lingkungan, pembangunan, tindak lanjut, keselamatan, humanis, komitmen menuju rehabilitasi, kontrol, dan advokasi (Nazaruddin, 2007; Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014). Menurut

Nazaruddin (2007), jurnalisme bencana idealnya menyediakan jenis informasi sesuai dengan fase bencana karena masyarakat memerlukan informasi yang berbeda pada setiap fase bencana. Pada fase prabencana, jurnalisme fokus pada kampanye berkelanjutan yang bersifat mengingatkan sehingga masyarakat selalu waspada, tetapi tetap tenang (Nazaruddin, 2007). Pada saat terjadi bencana, jurnalisme berusaha mengurangi rumor-rumor yang meresahkan masyarakat (Nazaruddin, 2007).

Jurnalisme bencana, idealnya menerapkan prinsip jurnalisme bencana dalam memberitakan bencana, mulai dari pengumpulan hingga penyajian berita (Nazaruddin, 2007). Prinsip jurnalisme bencana yang diterapkan selama pengumpulan berita, berdampak langsung pada berita yang dipublikasikan di media. Berita yang disajikan di media massa berisi informasi-informasi yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai risiko bencana (Lestari et al., 2018). Berita-berita tersebut dikonsumsi langsung oleh masyarakat umum tanpa segmentasi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan sehingga berdampak pada konstruksi realitas konsumen media yang sesuai dengan konstruksi media (Triyaningsih, 2020).

Namun selama ini, jurnalisme bencana di Indonesia menuai berbagai kritik. Pada pemberitaan Tsunami di Aceh tahun 2004, jurnalisme dinilai kerap mengabaikan fungsinya sebagai lembaga kontrol, tidak menunjukkan empati pada korban, pemberitaan yang tidak konsisten dan tidak pernah tuntas, dan cenderung dramatis. Jurnalisme juga dianggap tidak mengambil bagian dalam sistem peringatan dini pada fase prabencana (Nazaruddin, 2007). Tidak hanya itu, praktik

jurnalisme bencana pada media daring dianggap tidak memberikan porsi yang seimbang pada fase kesiapsiagaan dan pascabencana. Media daring juga dinilai lebih banyak memberikan ruang bagi aparat pemerintah sebagai narasumber daripada masyarakat (Lestari et al., 2018).

Pada masa awal krisis COVID-19 di Indonesia, jurnalisme dinilai cenderung mereproduksi pernyataan pejabat yang meremehkan pandemi, menyampaikan informasi yang dinilai kurang tepat, rasisme, dan menggambarkan kepanikan sejak pertama kali Indonesia mengumumkan pasien positif COVID-19 (Utomo, 2020). Sebelum dilaporkannya kasus COVID-19 di Indonesia, media daring dan televisi menyampaikan informasi dasar mengenai COVID-19, misinformasi dan rasisme terhadap Tiongkok, kegagalan komunikasi publik pemerintah, dan narasi pariwisata serta investasi (Utomo, 2020). Selain itu, menurut Utomo (2020), beberapa media di Indonesia justru mengangkat tema konspirasi, dinilai menjadi juru bicara pemerintah, dan memperkuat narasi kepentingan politik tertentu karena memberitakan tema-tema yang kurang substansial (Utomo, 2020).

Penerapan prinsip jurnalisme bencana pada pandemi COVID-19 sebelumnya pernah diteliti oleh Syarah et al. (2020) terhadap media daring Republika dalam subkanal Indeks Berita Baik. Melalui analisis isi kualitatif dan wawancara dengan wakil pemimpin redaksi, Syarah et al (2020) menemukan bahwa Republika menerapkan prinsip akurasi, humanis, komitmen menuju rehabilitasi, serta kontrol dan advokasi. Prinsip akurasi terlihat dari kelengkapan unsur berita 5W + 1H yang terpenuhi di hampir semua berita. Selanjutnya, prinsip humanis diterapkan dengan memuat berbagai sumber pada berita dan menyampaikan pesan

dari segala pihak yang terkait COVID-19. Prinsip komitmen menuju rehabilitasi diterapkan Republika dengan memberitakan pemulihan pasien, kondisi wisma atlet, dan upaya kreatif rumah sakit dalam penyembuhan dan pemulihan pasien. Sementara itu, prinsip kontrol dan advokasi terlihat dari pemberitaan secara terus menerus mengenai pemberian bantuan bencana COVID-19 dan pemantauan jumlah kasus pasien sembuh. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip jurnalisme bencana dapat diterapkan dalam hasil berita dengan bentuk yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan prinsip jurnalisme pada pemberitaan COVID-19 di media daring periode 2 Februari hingga 2 Maret 2020. Jangka waktu 2 Februari hingga 2 Maret 2020 merupakan fase prabencana pandemi COVID-19, baik di dunia, maupun di Indonesia karena baru diidentifikasi sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 (Putri, 2020). Pada fase prabencana, prinsip jurnalisme bencana penting untuk diterapkan karena berhubungan dengan peran media, yaitu mempersiapkan masyarakat terhadap bahaya yang akan terjadi terutama pada kondisi terburuk pandemi COVID-19 (Utomo, 2020). Sebelum terdapat kasus COVID-19 di Indonesia, masyarakat harus waspada, mengingat tingkat persebaran virus yang luas dan kondisi Indonesia yang rentan terhadap pandemi ini. Pada fase tersebut, penerapan prinsip jurnalisme bencana pada pemberitaan di media daring juga menjadi penting karena pemberitaan membentuk persepsi masyarakat terhadap risiko bencana (Lestari et al., 2018).

Jangka waktu 2 Februari 2020 dipilih karena pada tanggal tersebut, pemerintah Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Kota Wuhan, RRT dan mengadakan karantina selama 14 hari di Pulau Natuna. Tindakan tersebut dianggap sebagai langkah menghindari persebaran COVID-19 di Indonesia yang telah terjadi di negara-negara lain. Sementara itu, batas pemberitaan pada 2 Maret 2020 dipilih karena pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut sekaligus menandakan berakhirnya fase prabencana pandemi COVID-19 di Indonesia.

Penelitian ini mengambil kasus pada pemberitaan di *Kompas.com* dengan fokus penelitian pada aspek hasil. Seperti yang dikemukakan oleh Nazaruddin (2007), bahwa aspek hasil berita merupakan salah satu dari dua aspek pemberitaan bencana, yaitu aspek proses dan aspek hasil. Penelitian ini fokus pada konten berita, bukan pada bagaimana konten berita diciptakan. Fokus penelitian pada aspek berita ditentukan karena berita dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan berdampak terhadap persepsi masyarakat tentang risiko bencana (Lestari et al., 2018; Triyaningsih, 2020). Hasil penelitian oleh Triyaningsih (2020) juga menunjukkan bahwa pemberitaan dan informasi yang disediakan oleh media massa memberikan efek yang kuat terhadap persepsi masyarakat tentang COVID-19.

Kompas.com merupakan media daring di Indonesia yang memberitakan COVID-19 sejak pelaporan kasus pertamanya pada 31 Desember 2019. *Kompas.com* pertama kali hadir pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. Saat ini, *Kompas.com* berada di bawah PT Kompas Cyber Media (KCM), yang seluruhnya dimiliki oleh grup Kompas Gramedia (Kompas.com, 2020).

Pemilihan *Kompas.com* sebagai objek penelitian ini, yang pertama karena *Kompas.com* memiliki popularitas di kalangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan SimilarWeb (2020) yang diakses pada 13 Februari 2020, kunjungan *Kompas.com* mencapai angka 122 juta kali setiap bulan dengan durasi 4:49 menit pada setiap kunjungan. Sebanyak 90,92% pengunjung mengakses *Kompas.com* melalui perangkat seluler dan satu pengunjung rata-rata mengakses 2 halaman dalam sehari.

Selain itu, pemilihan *Kompas.com* sebagai objek penelitian didasari oleh temuan penelitian terdahulu bahwa *Kompas.com*, pada pemberitaan bencana Gunung Sinabung, belum sepenuhnya berperan mendukung upaya-upaya mitigasi yang dilakukan sebelum bencana terjadi (Lestari et al., 2018). *Kompas.com* juga dinilai kurang memperhatikan keberimbangan pemberitaan pada bencana-bencana yang telah terjadi di Indonesia, yaitu bencana Bom Sarinah tahun 2016, dan gempa Lombok Donggala tahun 2018 (Sinaga, 2016; Suwarno & Suryawati, 2019). *Kompas.com* lebih sering menampilkan berita dengan satu narasumber, memberikan ruang yang lebih banyak bagi narasumber aparat saat bencana gempa Lombok 2018 (Suwarno & Suryawati, 2019). Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam memberitakan bencana selama ini, *Kompas.com* masih belum merefleksikan jurnalisme bencana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip jurnalisme bencana pada kasus pemberitaan COVID-19 di *Kompas.com* periode 2 Februari – 2 Maret 2020.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan prinsip jurnalisme bencana dalam pemberitaan COVID-19 di media daring *Kompas.com* periode 2 Februari 2020 – 2 Maret 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan prinsip jurnalisme bencana pada aspek hasil pemberitaan COVID-19 di *Kompas.com* pada periode prabencana pandemi. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk penerapan prinsip akurasi jurnalisme bencana melalui dalam isi pemberitaan, pemilihan narasumber, pemilihan kata, dan visualisasi.
2. Mendeskripsikan bentuk penerapan prinsip keseimbangan jurnalisme bencana dalam isi area dan porsi narasumber pemberitaan.
3. Mendeskripsikan bentuk penerapan prinsip kontrol dan advokasi jurnalisme bencana dalam ketersediaan informasi dalam pemberitaan.
4. Mendeskripsikan bentuk penerapan prinsip lingkungan dan pembangunan jurnalisme bencana dalam ketersediaan informasi pada pemberitaan.
5. Mendeskripsikan bentuk penerapan prinsip tindak lanjut jurnalisme bencana pada pemberitaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini akan memberikan data empiris terkait kajian jurnalisme bencana pada media daring. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa yang memiliki peminatan pada bidang komunikasi massa dan digital yang akan mendalami jurnalisme bencana dengan melakukan kajian analisis isi media melalui pendekatan kualitatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memaparkan penerapan prinsip jurnalisme bencana di media daring dalam kasus COVID-19. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak-pihak dalam ranah jurnalistik terkait penerapan prinsip jurnalisme bencana pada media daring. Harapannya, penelitian ini dapat pula menjadi referensi bagi para praktisi dalam konteks bencana yang lain.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini memiliki kerangka teori yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan teori yang disesuaikan dengan ranah Ilmu Komunikasi agar dapat ditemukan keterkaitan antara teori dan hasil temuan penelitian. Kerangka teori dalam penelitian ini akan membahas bencana dan fase bencana, komunikasi risiko dalam konteks kebencanaan, yang dalam penelitian ini adalah bencana pandemi, dan jurnalisme

bencana yang akan digunakan untuk membantu menganalisis pemberitaan COVID-19 di media daring.

1. Bencana Pandemi

Bencana pandemi merupakan wabah penyakit yang meningkatkan angka kesakitan dan kematian di wilayah yang sangat luas yang berpotensi menyebabkan kehancuran ekonomi, sosial, dan politik secara tiba-tiba karena melebihi kemampuan masyarakat terdampak untuk menanggulangnya dengan sumber daya mereka sendiri (Jamison et al., 2017; Shaluf, 2007). A Dictionary of Epidemiology (dikutip dari Kelly, 2011) mendefinisikan pandemi sebagai wabah penyakit yang muncul dalam skala global, melewati batas-batas internasional, dan biasanya mempengaruhi jumlah orang yang sangat banyak. Selama jangka waktu seratus tahun terakhir, kemungkinan terjadi pandemi semakin meningkat karena perubahan mobilitas global, urbanisasi, penggunaan lahan, dan eksploitasi lingkungan alam (Jamison et al., 2017).

Pandemi dan epidemi, atau wabah penyakit skala regional, yang terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang disebabkan oleh *SARS Coronavirus* (SARS-CoV) pada tahun 2002 di Guangdong RRT. Kemudian pada tahun 2012, muncul *Middle Eastern Respiratory Syndrome* (MERS) yang disebabkan oleh *MERS Coronavirus* (MERS-CoV) di Negara Arab Saudi dan Timur Tengah. Sementara itu, pada akhir tahun 2019, *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) muncul pertama kali di Wuhan, RRT, yang disebabkan oleh *SARS Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) (Abdillah, 2020).

Melalui perspektif manajemen risiko bencana, bencana terbagi menjadi lima (5) fase yang dapat membantu mengidentifikasi jenis aktivitas yang dilakukan pada setiap fasenya. Siklus manajemen bencana dipaparkan oleh Wolensky, Waugh, dan Helsloot dan Ruitenber (dikutip dari Paidi, 2012), yang terdiri dari:

TABEL 1
Lima Fase Bencana

No	Fase	Aktivitas
1.	Persiapan	Pada fase ini, pemerintah perlu menekankan keselamatan masyarakat di wilayah cakupan bencana dan pemahaman kesadaran bencana pada masyarakat perlu ditekankan. Masyarakat perlu memahami tindakan yang perlu mereka lakukan ketika bencana terjadi.
2.	Mitigasi	Pada fase ini, kegiatan pengurangan dampak negatif bencana perlu ditekankan. Kegiatan utama pada tahap mitigasi meliputi kebijakan pengembangan ekonomi dan identifikasi temuan sumber daya.
3.	Tanggap darurat	Koordinasi yang baik dari berbagai pihak sangat diperlukan pada fase ini. Koordinasi memungkinkan distribusi bantuan diberikan cepat dan tepat kepada masyarakat terdampak bencana.
4.	Pemulihan	Pada fase pemulihan, aktivitas perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dilaksanakan dengan orientasi kondisi wajar, mulai dari aspek pemerintahan hingga kehidupan masyarakat pada wilayah terdampak.
5.	Rekonstruksi	Pada fase rekonstruksi, dilakukan pembangunan kembali semua sarana dan prasarana kelembagaan pada wilayah terdampak, baik tingkat pemerintah, maupun masyarakat untuk jalannya kembali roda perekonomian, sosial, budaya, hukum dan keikutsertaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Sumber: Paidi (2012)

2. Komunikasi Risiko Bencana dan Peran Media

Sellnow et al. (2009) menyatakan bahwa risiko merupakan tidak adanya kepastian. Sebuah tindakan dikatakan tidak memiliki risiko jika hasil dari tindakan tersebut telah diketahui secara pasti. Namun, situasi yang penuh dengan kepastian

mutlak hampir tidak pernah ada. Dengan begitu, ketidakpastian merupakan “variabel kunci” dari persepsi risiko dan proses komunikasi risiko (Palenchar & Heath, 2002). Baker (1990) mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan bahaya yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Ketidakpastian memunculkan pertimbangan terhadap kemungkinan hasil dari sebuah tindakan berdasarkan informasi yang tersedia. Jika dilihat dari perspektif ini, cara mengatur risiko memiliki dampak signifikan dalam kualitas kehidupan (Sellnow et al., 2009).

Komunikasi risiko didefinisikan Covello (1992) sebagai pertukaran informasi di antara berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan, komunitas, atau individu, mengenai sifat, besarnya, pentingnya, dan/atau kontrol dari sebuah risiko. Plough & Krimsy (dalam Baker, 1990) mendefinisikan komunikasi risiko, dalam arti sempit, sebagai penyampaian informasi mengenai risiko lingkungan dan kesehatan dari para ahli melalui saluran yang telah dirancang kepada awam. Secara lebih luas, mereka mendefinisikan komunikasi risiko sebagai proses komunikasi, baik publik, maupun privat, mengenai risiko sosial, atau pribadi, dengan, atau tidak dengan tujuan tertentu yang disampaikan oleh sumber manapun melalui saluran apapun kepada khalayak manapun (Baker, 1990).

Komunikasi risiko fokus membangun dan menyampaikan pesan sebelum sebuah peristiwa terjadi, yang kemudian menjadi fokus penelitian ini, yaitu prabencana pandemi COVID-19. Usaha komunikasi tersebut menjadi rumit baik bagi para pelaku komunikasi risiko, atau para penerima pesan. Dalam konteks penelitian ini, media memiliki peran sebagai penyiar dan penerjemah informasi mengenai risiko. Media beberapa kali menuai kritik karena melebih-lebihkan risiko

atau menekankan drama daripada memaparkan fakta secara saintifik (Janoske et al., 2012).

Penggunaan istilah komunikasi risiko dan komunikasi krisis sering dipertukarkan. Namun, menurut Sellnow et al (2009), keduanya memiliki perbedaan. Krisis merupakan peristiwa bencana yang menyebabkan kerugian secara fisik, emosional, dan finansial (Sellnow et al., 2009). Sementara itu, tujuan utama komunikasi risiko adalah menghindari terjadinya krisis jangka panjang. Ketidaksanggupan dan kegagalan dalam mengenali serta bertindak terhadap risiko, dapat menimbulkan krisis. Informasi-informasi yang digunakan dalam komunikasi risiko didasari oleh informasi dari pakar atau ahli dan diadaptasi sehingga masyarakat dapat menggunakannya sebagai dasar pertimbangan dalam ranah pribadi (Sellnow et al., 2009).

Sementara itu, media memiliki peran yang signifikan dalam komunikasi risiko bencana, terutama pada fase prabencana. Hubungan antara media dan pembaca merupakan aspek yang penting bagi masyarakat dalam menanggulangi situasi bencana, baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana terjadi (Perez-Lugo, 2004). Media memiliki peran penting dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap risiko dan masalah kesehatan masyarakat. Informasi di media massa, yang tidak seimbang dan cenderung menyalahkan, dapat menyebabkan persepsi risiko terhadap isu kesehatan masyarakat menjadi rendah (Sandell et al., 2013).

Bencana, secara umum, memiliki hampir semua kriteria nilai berita, seperti kemunculannya yang secara tiba-tiba, peningkatan dan penyebaran kasus

secara signifikan, luas, dan cepat, aktual, bermakna bagi masyarakat, keberlanjutan, dan sifatnya tidak dapat diprediksi sehingga media massa akan selalu memberitakan bencana (Nazaruddin, 2007; Vasterman & Ruigrok, 2013). Namun, media cenderung memberitakan kemungkinan paling buruk karena memiliki nilai berita lebih tinggi (Vasterman & Ruigrok, 2013). Pada konteks bencana pandemi, media menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai peningkatan jumlah kasus, jumlah korban meninggal, dan langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat (Vemula & Gavaravarapu, 2016).

Masyarakat memiliki kecenderungan mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian pada situasi prabencana pandemi. Namun, jika informasi yang tersedia bersifat ambigu dan masih diperdebatkan, ketidakpastian justru dapat meningkat (Sellnow et al., 2009). Komunikasi risiko, dalam konteks kebencanaan, memberikan landasan untuk memperkuat dukungan dan kepercayaan masyarakat terkait ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas dari informasi mengenai risiko (Van Asselt & Renn, 2011). Pada saat yang bersamaan, informasi di media massa juga memberikan kontribusi bagi kepanikan masyarakat karena mengeksploitasi ancaman dan risiko (Ungar, 1998). Pemberitaan bencana dapat menimbulkan perasaan takut, khawatir, dan cemas yang tinggi, sehingga membuat masyarakat memproteksi dirinya dan menyebarkan ketakutan secara berlebihan terhadap sebuah penyakit (Vemula & Gavaravarapu, 2016).

Marcotte (dalam Potter & Ricchiardi, 2009) menyebutkan bahwa media memiliki empat peran penting dalam bencana, yaitu sebagai berikut:

- a. Pusat informasi, media menarasikan situasi bencana yang sedang dihadapi masyarakat, dampak bencana, perubahan akibat bencana, dan penyebab terjadinya bencana.
- b. Jalur komunikasi, media menggali dan menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui pemberitaannya.
- c. Sistem peringatan dini, media menyebarkan informasi akurat secara berkala.
- d. Wadah pertukaran informasi bagi masyarakat, artinya media memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkumpul, membagi perhatian, dan saling mendukung selama masa bencana.

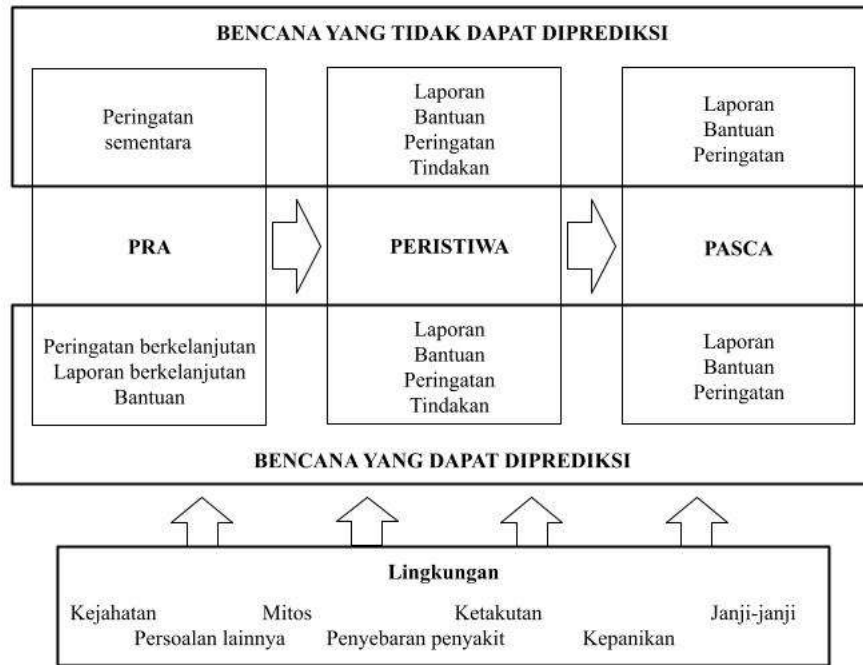
Media harus memposisikan diri dalam fase-fase bencana karena masyarakat membutuhkan informasi yang berbeda pada setiap fase bencana. Reynolds & Seeger (dalam Utomo, 2020) memaparkan rumusan *Crisis and Emergency Risk Communication* (CERC) yang berfokus pada proses komunikasi tentang potensi risiko, risiko yang baru saja muncul, dan yang akan berkembang kepada masyarakat. CERC memiliki lima elemen, yaitu:

- a. Prakrisis. Media berperan menjadi *alarm* bagi masyarakat sebelum krisis terjadi sebagai upaya menyiapkan masyarakat terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi, baik pada bencana yang dapat diprediksi, maupun tidak. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan pandemi yang dapat diprediksi karena sebelumnya, negara-negara lain telah mengalaminya, dengan kata lain, Indonesia telah mendapatkan peringatan mengenai pandemi tersebut (Utomo, 2020).

- b. Peristiwa awal. Media memiliki peran dengan menempatkan kejadian awal krisis dalam konteks yang relevan, tidak membesar-besarkan sehingga membuat panik, atau meremehkan sehingga masyarakat menganggap pandemi ini merupakan situasi yang serius. Media, jika memposisikan diri dengan tepat, dapat membekali masyarakat dengan informasi yang akurat.
- c. Pemeliharaan. Peran media pada saat ini adalah mengawasi proses kebijakan publik yang diambil. Peran ini merupakan peran yang krusial untuk mengevaluasi kebijakan.
- d. Resolusi. Resolusi merujuk pada proses komunikasi krisis yang harus dilakukan jika krisis telah diketahui. Pada saat ini, media berperan mengidentifikasi kemungkinan yang akan terjadi dan dampak setelah krisis berakhir.
- e. Evaluasi. Proses komunikasi krisis pada saat ini dilakukan tepat ketika krisis berakhir. Komunikasi fokus pada pelajaran yang dapat diambil dari krisis yang telah terjadi. Peran media pada saat ini adalah mendokumentasikan *timeline* krisis yang ada dan dapat digunakan sebagai alarm untuk kedepannya.

Posisi dan keterlibatan media dalam fase-fase bencana juga dijelaskan oleh Prajarto (2008) dengan bagan sebagai berikut:

BAGAN 1
Posisi dan Keterlibatan Bencana



Sumber: Prajarto (2008)

Bagan tersebut menggambarkan posisi dan keterlibatan media dalam menghadapi bencana atau krisis, baik yang dapat diprediksi, maupun tidak dapat diprediksi. Prajarto (2008) menjelaskan bahwa keterlibatan media terletak pada informasi yang bersifat mengingatkan, pemberian informasi berwujud laporan (reportase), perkembangan peristiwa, dan tindakan dalam pemberian bantuan guna mengurangi dampak bencana. Bentuk-bentuk keterlibatan media dapat diartikan sebagai berbagai format informasi dan berita yang disajikan oleh media, wadah forum masyarakat untuk terhubung dan menjalin kontak dengan korban bencana

dan lembaga-lembaga resmi. Pada tahap prabencana, media menyediakan informasi yang bersifat memperingatkan dan laporan (Prajarto, 2008).

Prajarto (2008) menambahkan bahwa dalam situasi bencana, masalah dapat muncul ketika terdapat pihak yang berusaha memanfaatkan suasana panik, bingung, dan penuh ketidakpastian. Informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dapat muncul dan memperkeruh suasana. Idealnya, media hadir dengan informasi yang akurat berdasarkan realitas sosial, tidak hanya menyediakan laporan langsung dan kemungkinan informasi berdasarkan realitas psikis. Masalah yang timbul akibat pihak yang berusaha memanfaatkan suasana tersebut dapat semakin berkembang pada fase pascabencana karena kondisi ketidakberdayaan masyarakat. Namun, informasi yang tersedia di media adalah mengenai bencana sebagai sebuah kejadian sehingga informasi risiko sebagai langkah preventif bencana masih hadir secara terpisah (Prajarto, 2008).

Hampir sama dengan yang disampaikan Prajarto (2008) mengenai keterlibatan media dalam fase-fase bencana, Wukich (2016) mengklasifikasikan informasi-informasi berdasarkan setiap fase bencana. Klasifikasi jenis informasi tersebut dipaparkan dalam tabel berikut:

TABEL 2
Klasifikasi Jenis Informasi

No	Jenis informasi	Definisi	Fase bencana
1.	Peringatan	Informasi berisi peringatan dan indikasi bahaya	Tanggap darurat, Pemulihan
2.	Nasihat	Panduan terhadap tindakan yang harus dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi	Pencegahan, Mitigasi, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan

3.	Evakuasi	Informasi mengenai perintah, rute, dan upaya evakuasi lainnya	Tanggap darurat, Pemulihan
4.	Informasi situasional	Laporan mengenai lokasi, keadaan sekitar, dan perubahan kondisi dari sebuah peristiwa. Informasi ini berguna untuk membangun kesadaran situasional dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi, menginterpretasi indikator kunci untuk melakukan perubahan, dan memproyeksikan masa depan situasi tersebut.	Pencegahan, Mitigasi, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
5.	Dampak bahaya	Informasi mengenai dampak, korban, dan konsekuensi lainnya dari sebuah kejadian	Tanggap darurat, Pemulihan
6.	Penutupan	Laporan mengenai fasilitas dan infrastruktur lainnya	Mitigasi, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
7.	Pembukaan	Laporan mengenai pembukaan fasilitas dan infrastruktur lainnya	Tanggap darurat, Pemulihan
8.	Operasi	Deskripsi mengenai operasi yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan aparat	Pencegahan, Mitigasi, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
9.	Persediaan sumber daya	Informasi mengenai persediaan sumber daya	Pencegahan, Mitigasi, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
10.	Manajemen rumor	Koreksi dan/atau klarifikasi terhadap kesalahan informasi yang berasal dari sumber eksternal	Pencegahan, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
11.	Koreksi	Koreksi dan/atau klarifikasi terhadap kesalahan informasi yang berasal dari sumber internal	Pencegahan, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
12.	Pengumpulan intel	Permintaan informasi untuk meningkatkan kesadaran situasional dan meningkatkan efektivitas tindakan pada saat fase tanggap dan pemulihan	Tanggap darurat, Pemulihan
13.	Rekrut dan koordinasi	Usaha perekrutan dan koordinasi relawan	Pencegahan, Mitigasi, Persiapan, Tanggap

	relawan		darurat, Pemulihan
14.	Penggalangan dana	Permintaan donasi keuangan	Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
15.	Pencarian dan koordinasi sumber daya	Permintaan bantuan selain keuangan	Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
16.	Edukasi	Promosi tindakan pengurangan risiko	Pencegahan, Mitigasi, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
17.	Penyuluhan	Promosi, deskripsi, dan/atau koordinasi mengenai penyuluhan dan konferensi.	Pencegahan, Mitigasi, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
18.	Latihan	Promosi dan/atau koordinasi mengenai latihan kesiapan komunitas	Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
19.	Pemantik diskusi	Permintaan informasi atau dialog dengan komponen pemerintah mengenai pengurangan risiko di luar fase tanggap dan pemulihan	Pencegahan, Mitigasi, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
20.	Gamifikasi	Promosi upaya kesadaran dan pengurangan risiko melalui permainan dan kontes	Pencegahan, Mitigasi, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
21.	Berita administratif	Promosi kegiatan administratif pemerintah dan prestasi yang didapatkan	Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan
22.	Opini dan komentar	Ekspresi dukungan, pengharapan, rasa syukur, simpati, frustasi, dan emosi lainnya.	Pencegahan, Mitigasi, Persiapan, Tanggap darurat, Pemulihan

Sumber: Wukich (2016)

3. Jurnalisme Bencana

Jurnalisme berasal dari kata *journal*, yang memiliki arti “catatan harian” (Fitriawan, 2017). Kovach & Rosenstiel (2014) mengungkapkan bahwa jurnalisme memiliki tujuan menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat sehingga mereka dapat hidup merdeka dan memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Jurnalisme hadir untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi. Jurnalisme mengalami perubahan ketika teknologi komunikasi dan informasi juga

mengalami perkembangan. Namun, esensi jurnanisme pada dasarnya tidak akan berubah (Kovach & Rosenstiel, 2014).

Pada situasi kebencanaan, jurnanisme semakin dibutuhkan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya. Jurnanisme diharapkan dapat membantu berbagai pihak untuk mengetahui informasi mengenai kondisi bencana sehingga mengurangi dampak risiko bahaya bencana (Lestari et al., 2018). Jurnanisme menjadi sarana untuk bertukar informasi risiko. Tujuan jurnanisme pada saat ini adalah membantu masyarakat mengoptimalkan tujuan-tujuan kesehatan publik dan mengurangi risiko sekaligus mengurangi kepanikan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian (Parahita, 2020).

Jurnalisme bencana merupakan proses pencarian dan penyajian berita dan informasi mengenai bencana, baik yang disebabkan oleh alam, maupun manusia, yang telah, sedang, atau akan terjadi (Houston et al., 2019). Nazaruddin (2007) mengemukakan dua aspek dalam pemberitaan bencana, yaitu aspek proses dan aspek hasil. Aspek proses merujuk pada proses produksi berita-berita mengenai bencana, sedangkan aspek hasil mengacu pada berita-berita bencana yang disajikan oleh media (Nazaruddin, 2007).

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana, baik secara geologis, maupun sosiologis. Pada pandemi COVID-19, kerentanan Indonesia disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, yaitu mencapai 268 juta jiwa. Selain tingginya jumlah penduduk, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, kepadatan penduduk Indonesia juga terbilang tinggi, mencapai 52,9 persen di wilayah perkotaan (Novika, 2020). Pernyataan tersebut sejalan

dengan penjelasan pandemi oleh Jamison et al (2017), bahwa kemungkinan pandemi dari waktu ke waktu semakin tinggi karena perubahan pada masyarakat secara global (Jamison et al., 2017; Nazaruddin, 2007; Pranita, 2020).

Bencana, yang selalu diikuti dengan ketidakpastian dan kesimpangsiuran informasi, membuat masyarakat selalu berusaha untuk mencari informasi yang disajikan oleh media massa. Jurnalisme mengonstruksi wacana mengenai penyakit-penyakit dan memberikan informasi terkait urgensi persebaran penyakit baru, penyakit menular, dan menekankan pentingnya gaya hidup sehat (Vemula & Gavaravarapu, 2016). Pemberitaan mengenai bencana memerlukan pendekatan jurnalisme bencana. Asteria (2016) menguraikan fungsi-fungsi jurnalisme bencana sebagai berikut:

- a. Jurnalisme bencana tidak hanya menyampaikan informasi mengenai dampak bencana, tetapi juga mendidik masyarakat terhadap kejadian bencana dan memberikan fakta bencana yang dapat menjadi bekal di masa yang akan datang.
- b. Jurnalisme bencana mengedepankan nilai humanisme sosial dengan mengungkap informasi yang berupa data atau fakta yang akurat sehingga dapat menjadi bahan pendidikan sosial bagi masyarakat terdampak mengenai pelajaran yang dapat diambil dari bencana.
- c. Jurnalisme bencana tidak melukai perasaan (empati) korban dan masyarakat terdampak.

Yusuf, Masduki, Stephankowsky & Seifert, High dan McMahon, dartcenter.org, Polysemia, Amiruddin (dikutip dari Nazarudin, 2007) mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar jurnalisme bencana yang dirangkum Nazaruddin (2007), yang meliputi:

a. Prinsip akurasi

- 1). Jurnalisme memiliki tanggung jawab memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai apa yang sedang terjadi. Jurnalisme harus mampu menjelaskan informasi yang berkembang dan membuktikan kebenarannya.
- 2). Peliputan kebencanaan sebaiknya dilakukan oleh tim, bukan hanya individu karena cakupannya yang luas dan dampak bencana yang besar.
- 3). Pada praktiknya, jurnalisme harus mengecek dan mengecek kembali sumber informasi yang relevan, tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi.
- 4). Melibatkan pakar atau ahli dalam komentar mengenai bencana sehingga mereka dapat menganalisis berdasarkan prediksi dan kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Jurnalisme harus mampu menyediakan informasi, lengkap dengan argumen, konteks, dan cara menghadapi situasi di masa depan.

b. Prinsip humanis

- 1). Jurnalisme harus mampu memberikan porsi seimbang bagi semua pihak untuk menyuarakan suara mereka. Prinsip dasar ini menuntut

para pelaku jurnalistik mengurangi porsi dari pejabat negara karena mereka cenderung memberikan pesan-pesan normatif.

- 2). Menghormati peraturan mengenai akses media yang dibuat oleh rumah sakit, atau institusi kesehatan masyarakat lainnya.
- 3). Jurnalisme harus menghargai perasaan korban dengan menghindari peliputan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran etis, seperti memaksa orang yang sedang berduka untuk diwawancarai, atau menampilkan gambar yang penuh penderitaan.
- 4). Jurnalisme harus menghargai mitologi yang ada dipercayai masyarakat. Walaupun mitologi ini kontras dengan penjelasan saintifik, praktik jurnalisme tidak seharusnya mengangkat perbedaan tersebut secara berlebihan sehingga tampak seperti sebuah pertentangan.

c. Prinsip komitmen menuju rehabilitasi

- 1). Pada tahap pascabencana, jurnalisme bertugas mengakselerasi proses pemulihan psikologis, ekonomi, dan sosial masyarakat yang terdampak bencana. Jurnalisme harus mengurangi segala berita yang cenderung tidak sejalan dan kontra. Jurnalisme juga harus memerhatikan peliputan korban bencana dengan segala pertimbangan trauma psikologis yang dialami.
- 2). Jurnalisme harus menunjukkan sikap optimis dengan menyajikan solusi yang dapat dilakukan masyarakat. Pemberitaan harus

melibatkan akademisi atau ahli dalam bidang bencana yang telah dialami.

d. Prinsip kontrol dan advokasi

- 1). Jurnalisme bencana pada prinsipnya harus memberitakan bencana secara konsisten dan terus menerus sepanjang masalah-masalah penting yang timbul akibat bencana masih berlangsung.
- 2). Prinsip kontrol paling penting adalah jurnalisme memiliki peran penting dalam sistem peringatan dini bencana.

Sementara itu, Seeds Technical Service-Knowledge Links (2014) memaparkan prinsip-prinsip dalam pemberitaan bencana, yaitu:

a. Prinsip akurasi

Prinsip akurasi meliputi informasi latar belakang komunitas terdampak bencana, perubahan fakta dan data, pemilihan kata, dan konteks pemberitaan. Verifikasi terhadap data dan informasi yang diberikan oleh narasumber, atau dari sumber lain, juga termasuk dalam prinsip akurasi. Selain itu, prinsip akurasi mencakup visualisasi pada pemberitaan yang harus menggambarkan realitas karena orang yang melihat visualisasi tersebut akan menganggapnya sebagai realitas.

- 1). Informasi latar belakang komunitas. Artinya, jurnalisme pada situasi bencana perlu memperhatikan informasi mengenai latar belakang komunitas terdampak, terutama daerah terpencil, misalnya latar belakang geografis, ekonomi, sosial, dan kerentanan mereka terhadap

bencana terdahulu. Latar belakang tersebut menyediakan konteks yang dapat mempengaruhi pemberitaan pada situasi bencana.

- 2). Fakta dan data. Fakta dan data berubah sepanjang waktu. Bahkan, beberapa kali, muncul rumor yang bertentangan terhadap fakta dan data seiring berjalannya waktu. Perubahan tersebut perlu dipantau untuk memastikan tidak terjadi persebaran informasi yang tidak benar, terutama pada era sosial media karena rumor dapat tersebar dengan begitu cepat, padahal pesan-pesan tersebut berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bencana. Pada praktiknya, jurnalisisme perlu memperhatikan pemilihan narasumber untuk memastikan informasi yang diberikan jelas dan sesuai dengan realitas.
- 3). Pemilihan kata. Pada pemberitaan, terdapat banyak kata atau istilah yang penggunaannya sering dipertukarkan sehingga dapat menimbulkan perbedaan perspektif masyarakat dan dapat berdampak pada persebaran informasi yang kurang tepat. Kata-kata tersebut, misalnya korban (*victim*) dan orang yang selamat (*survivor*), padahal penggunaan kata tersebut dapat mengubah nada pemberitaan. Contoh yang lain, penggunaan istilah “bencana alam” secara berulang-ulang dapat menyebabkan masyarakat menganggap bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak bencana dan merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap dampak bencana. Menurut Seeds Technical Service-Knowledge Links (2014), tidak ada istilah

“bencana alam”, tetapi “bahaya alam” yang kemudian berubah menjadi bencana karena kerentanan masyarakat.

- 4). Konteks. Tetap pada konteks merupakan unsur yang penting dalam pemberitaan bencana. Wilayah-wilayah yang cenderung sulit dijangkau sering digambarkan dengan representasi dari wilayah lain sebagai generalisasi keseluruhan wilayah terdampak tanpa pencarian fakta dan data lebih lanjut. Pemberitaan seperti itu akan berdampak pada bantuan yang diberikan dan pandangan masyarakat terhadap bencana tersebut.

b. Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan meliputi porsi pemberitaan yang seimbang dengan memberikan ruang bagi suara masyarakat yang paling rentan, suara-suara yang “kurang terdengar”, dan memberikan gambaran dari berbagai sisi pada setiap narasi berita. Prinsip keseimbangan juga memerlukan analisis mengenai waktu dan cara untuk memilih antara bersikap netral atau memihak.

- 1). Keseimbangan area. Pemberitaan bencana seharusnya tidak hanya mencakup wilayah yang memiliki dampak paling besar, tetapi juga wilayah-wilayah sekitarnya dan wilayah lain yang juga terdampak. Kurangnya perhatian pada wilayah-wilayah lain dapat berakibat pada distribusi bantuan dan berdampak pada pemulihan jangka panjang yang akan dilakukan.

- 2). Keseimbangan suara. Pemberitaan dengan berbagai sudut pandang dan perspektif dapat memunculkan isu-isu yang baru. Suara dan pandangan dari kelompok masyarakat marginal secara sosial dan ekonomi dapat berperan sebagai kunci untuk menyebarluaskan tindakan-tindakan individu atau kolektif untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakat marginal, yaitu tenaga pendidikan, dokter, dan tenaga profesional lain yang ada di daerah, anak-anak, perempuan, masyarakat difabel, lansia, dan kelompok masyarakat dengan mata pencaharian yang sama.
- 3). Keseimbangan berita positif dan negatif. Pemberitaan mengenai hal positif dan inovatif dapat mendorong dan memberikan harapan bagi masyarakat. Berita-berita tersebut, misalnya kegiatan positif yang dilakukan oleh pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas.
- 4). Keberpihakan. Pada pemberitaan setelah bencana, media biasanya memainkan peran sebagai “aktivis” dengan menyalahkan, mempolitisasi, dan tidak memberitakan sudut pandang tertentu dari dampak bencana. Para jurnalis harus berhati-hati dalam menentukan nada pemberitaan mereka.

c. Prinsip martabat

Prinsip martabat berusaha menjaga martabat orang-orang terdampak bencana ketika wawancara sebagai narasumber berita. Tidak semua orang

merasa nyaman ketika diwawancarai oleh media walaupun sebagian dari mereka juga lega karena mendapatkan perhatian dari media mengenai keadaan mereka. Praktik jurnalisme yang harus memperhatikan prinsip akurasi, juga harus menganalisis situasi jika hendak mewawancarai masyarakat yang terdampak bencana, terutama di tengah suasana duka.

- 1). Wawancara. Wawancara dilakukan oleh jurnalis dengan beberapa tahapan yang harus dilewati, seperti memperkenalkan diri dan bertanya kepada calon narasumber mengenai kesediaannya diwawancarai. Tidak semua masyarakat yang terdampak bencana, bersedia untuk memberikan informasi dan hal-hal penting lainnya. Selain itu, jurnalis juga harus memperhatikan ketika hendak merekam jawaban narasumber, baik rekaman visual, maupun audio, bahkan mencatatnya. Jurnalis harus menyesuaikan diri dengan konteks sosial di tempat peliputan mereka.
- 2). Visualisasi. Visualisasi yang ditampilkan saat situasi bencana biasanya dipenuhi dengan kehancuran dan penderitaan, tetapi perlu diperhatikan bahwa pemberitaan harus di antara melaporkan kejadian dan mempertahankan martabat para masyarakat yang terdampak bencana.
- 3). Sensitivitas. Cara penulisan berita, penggunaan kata untuk mendeskripsikan para masyarakat terdampak, dan pemilihan rekaman yang ditayangkan dalam pemberitaan, atau kutipan yang diambil dari

para narasumber memainkan peran yang penting bagi sensitivitas sebuah berita.

d. Prinsip lingkungan dan pembangunan

Jurnalisme, pada situasi bencana, melihat sesuatu di balik “bencana” dengan melihat potensi-potensi berita yang dapat muncul dan menganalisis faktor pengurangan risiko, termasuk pengaruh aspek pembangunan pada dampak bencana. Misalnya, kerentanan masyarakat yang dapat meningkat karena kurangnya infrastruktur pembangunan. Kerentanan masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, kesejahteraan perempuan, anak-anak, dapat meningkatkan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana dapat dibangun pada hampir semua aspek kehidupan, seperti pendidikan.. Selain itu, berita pada situasi bencana, tidak hanya bercerita tentang bencana, tetapi juga isu-isu lain yang tidak kalah pentingnya, seperti isu kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan, dan ekonomi. Berita pada situasi bencana juga berhubungan dengan setiap siklus bencana.

e. Prinsip tindak lanjut

Tindak lanjut, atau “follow up” diperlukan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan terhadap suatu peristiwa bencana. Pemberitaan yang berkesinambungan dapat membantu masyarakat terdampak untuk memperoleh bantuan. Bahkan, setelah bencana berakhir, berita lanjutan

harus terus dilakukan karena biasanya berbagai tantangan justru akan muncul setelah bencana terjadi.

- 1). Bantuan dan penggunaan bantuan. Penggunaan bantuan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain harus dipantau untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana atau masyarakat rentan mendapat bantuan secara tepat. Selain itu, penting untuk melaporkan keberhasilan bantuan dan tantangan yang dihadapi pada saat mengalokasikan bantuan. Penting juga untuk memastikan wilayah-wilayah terpencil, atau wilayah yang rentan untuk mendapat bantuan.
- 2). Pemulihan jangka panjang. Jurnalisme perlu menindaklanjuti pemulihan jangka panjang, seperti penggunaan konstruksi yang tahan lama untuk mengurangi risiko bencana, skema pemerintah serta kompensasi yang diberikan pada program-program pemulihan bencana, dan inisiatif kebijakan baru.
- 3). Kegiatan-kegiatan positif. Pemberitaan jangka panjang mengenai kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan setelah bencana terjadi dapat membawa perubahan pada bencana yang akan terjadi. Pemberitaan dapat meliputi inovasi menarik dari LSM atau komunitas, masalah yang muncul setelah bencana terjadi, dan cara mempersiapkan diri bagi bencana di masa depan.

f. Prinsip keselamatan

Pada peliputan peristiwa bencana, penting untuk memastikan keselamatan komunitas karena sebuah laporan atau berita, dapat memicu masalah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan ulang informasi dan data yang didapatkan dari lapangan. Selain itu, para jurnalis yang turun ke lapangan pada saat peliputan situasi bencana juga perlu menjaga dirinya agar tetap aman, misalnya dengan membawa alat-alat dasar keselamatan. Ketika hendak meliput topik sensitif, jurnalis harus memastikan keselamatan masyarakat. Jurnalis juga harus mempertimbangkan dengan matang dampak dari peliputannya.

Nazaruddin (2007) mengajukan praktik jurnalisme bencana normatif yang mencakup fase-fase bencana dan prinsip jurnalisme bencana. Fase-fase bencana menurut Yusuf, Masduki, dan Hight dan McMahon (dalam Nazaruddin, 2007), adalah sebagai berikut:

TABEL 3
Fase-fase Bencana

Fase	Periode	Waktu	Topik Utama	Narasumber
Prabencana		Sepanjang waktu sebelum terjadi bencana.	Sepanjang waktu sebelum terjadi bencana.	Warga, Aparat, Ahli
Pada saat bencana	Darurat	Pada waktu terjadi bencana hingga satu hari sesudahnya.	Informasi dasar dan akurat tentang jenis, sumber bencana, dan cara menyelamatkan.	Ahli, Aparat

Pascabencana	Darurat	1-2 pekan pascabencana (bencana berskala kecil-menengah). 1-2 bulan setelah masa bencana darurat (bencana besar).	Informasi kawasan bencana, cara memperoleh dan memberikan bantuan logistik, lokasi pengungsian, jumlah korban dan kerugian.	Warga, Aparat, Relawan, Ahli
	Pemulihan	1-2 pekan setelah masa darurat (bencana berskala menengah). 1-2 bulan setelah masa darurat (bencana besar).	Informasi kondisi pengungsian secara lebih lengkap (penghuni, interaksi sosial, bantuan. Pemulihan psikologis, gerakan penemuan keluarga, pendidikan darurat, kontrol bantuan bencana.	Warga, aparat, relawan, ahli
	Rehabilitasi	1-2 pekan setelah masa pemulihan (bencana berskala kecil dan menengah). 1-2 bulan setelah masa Pemulihan (bencana berskala besar).	Kampanye bangkit rehabilitasi sosial dan ekonomi, pembangunan kembali kerusakan fisik, distribusi bantuan rumah dan usaha produksi, kontrol bantuan bencana.	Warga, aparat relawan, ahli

Sumber: (Nazaruddin, 2007)

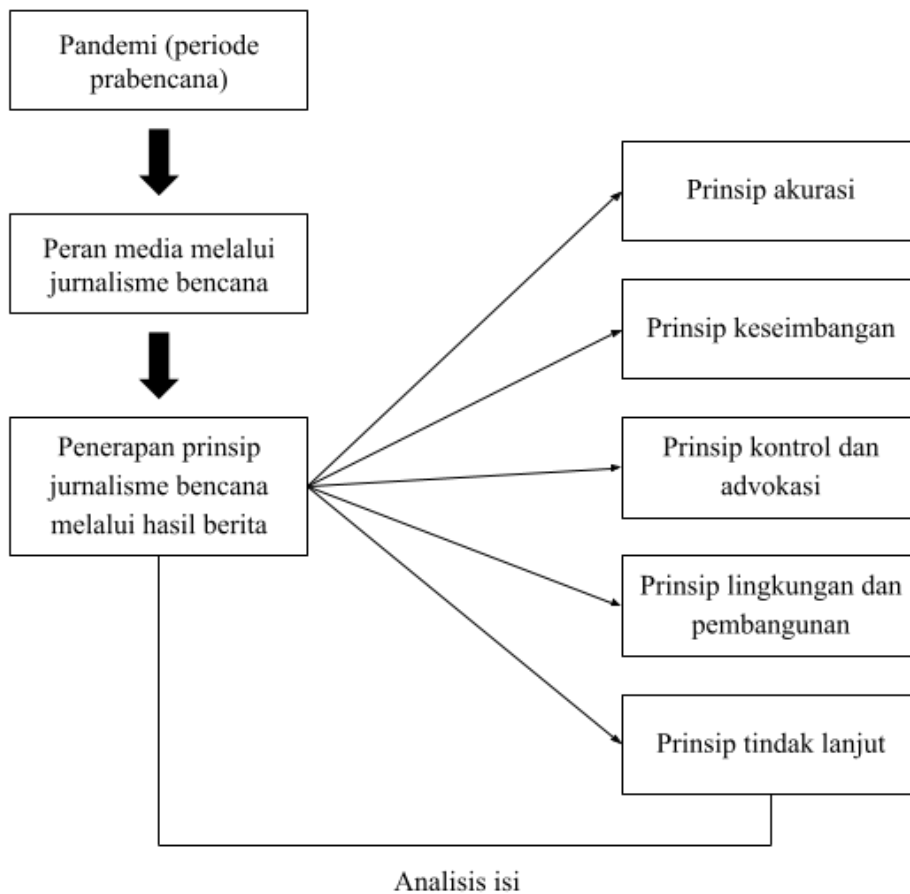
Praktik jurnalisme bencana di Indonesia, menurut Masduki (dalam Nazaruddin, 2007), menjalankan peran ganda yang kontradiktif, yaitu sebagai penyebar informasi dan peran sosial sebagai wadah bantuan bencana. Jurnalisme bencana menjadi urgensi di Indonesia karena selama ini, media dianggap melalaikan perannya pada situasi bencana. Media dipandang selalu mendramatisir kejadian-kejadian pada saat bencana. Pada momen bencana alam, media justru fokus pada memberitakan kisah-kisah tragis, isak tangis, dan kesedihan para korban. Jurnalisme pada saat itu tidak mengenal empati pada korban. Media memperoleh kritikan terhadap pemberitaan bencana. Kritik tersebut antara lain, informasi yang tidak akurat, pemberitaan yang tidak peka terhadap gender dan kelompok marjinal (Nazaruddin, 2007).

Utomo (2020) berpendapat bahwa praktik jurnalisme bencana dapat berubah menjadi “bencana jurnalisme”, terutama pada pandemi COVID-19 ini. Liputan-liputan jurnalistik pada masa pandemi dipandang sebagai pisau bermata dua, bahwa media menyediakan informasi kepada masyarakat secara akurat, tetapi di sisi lain media menyajikan berita-berita dengan unsur dramatisasi dan tidak substansial. Dramatisasi tersebut memiliki dampak buruk pada perilaku masyarakat karena masyarakat tidak menganggap pandemi sebagai bencana yang serius (Utomo, 2020). Pada fase prabencana, jurnalisme idealnya diarahkan pada perspektif mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Namun, praktik jurnalisme di Indonesia pada saat itu dinilai kurang memberikan peringatan bagi masyarakat Indonesia (Parahita, 2020).

F. Kerangka Konsep

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan prinsip jurnalisme bencana pada pemberitaan COVID-19 di Kompas.com periode 2 Februari – 2 Maret 2020. Periode waktu tersebut merupakan fase prabencana pandemi COVID-19 di Indonesia. Fase prabencana merujuk pada sepanjang waktu sebelum bencana pandemi terjadi (Nazaruddin, 2007). Kerangka konsep, yang menjadi kerangka pemikiran penelitian ini, digambarkan ke dalam skema berikut:

BAGAN 2
Kerangka Pemikiran Penelitian



Media memegang peran penting dalam periode prabencana pandemi COVID-19 di Indonesia. Media berperan memberikan informasi terkait urgensi penyebaran penyakit baru, penyakit menular, dan menekankan pentingnya gaya hidup sehat (Vemula & Gavaravarapu, 2016). Media, melalui jurnalisme bencana, membantu masyarakat mengoptimalkan tujuan-tujuan kesehatan publik, mengurangi risiko, dan kepanikan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian (Parahita, 2020). Menurut Yusuf, Masduki, dan Hight dan McMahan (dalam Nazaruddin, 2007), pada fase prabencana, substansi paling penting dalam jurnalisme adalah peringatan secara terus menerus untuk selalu waspada dan tenang karena Indonesia berada di wilayah yang rawan bencana.

Prinsip jurnalisme bencana dalam hasil pemberitaan pada periode prabencana pandemi penting untuk diterapkan karena pemberitaan dan informasi dari media massa memberikan efek yang kuat terhadap persepsi masyarakat tentang COVID-19 (Triyaningsih, 2020). Selain itu, masyarakat menjadikan berita di media sebagai sumber informasi di tengah kesimpangsiuran situasi kebencanaan (Nazaruddin, 2007). Terdapat lima prinsip jurnalisme bencana yang dapat diidentifikasi bentuk penerapannya melalui hasil pemberitaan, yaitu prinsip akurasi, prinsip kontrol, advokasi, prinsip keseimbangan, prinsip lingkungan, pembangunan, dan prinsip tindak lanjut (Nazaruddin, 2007; Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014). Bentuk penerapan prinsip jurnalisme bencana tersebut, diidentifikasi melalui empat aspek berita, yaitu narasumber, pemilihan kata, visualisasi, dan isi berita.

Prinsip akurasi, artinya jurnalisme bertanggung jawab memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai situasi yang sedang terjadi melalui hasil pemberitaannya (Nazaruddin, 2007). Prinsip akurasi penting untuk diterapkan pada hasil pemberitaan karena masyarakat membutuhkan informasi yang benar dan akurat di tengah situasi yang penuh ketidakpastian (Sellnow et al., 2009). Bentuk penerapan prinsip akurasi pada hasil berita dapat diidentifikasi dengan mencermati pemilihan narasumber yang relevan dalam berita, ketersediaan informasi yang memuat unsur perubahan fakta dan data dari pemberitaan sebelumnya, pemilihan kata untuk menjelaskan situasi prabencana pandemi, dan kesesuaian isi berita dengan visualisasi (Nazaruddin, 2007; Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014).

Yang kedua, prinsip keseimbangan, artinya hasil pemberitaan memberikan porsi seimbang bagi semua pihak untuk menyampaikan suara mereka sehingga memberikan gambaran dari berbagai sisi pada setiap narasi berita (Nazaruddin, 2007; Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014). Selain itu, prinsip ini juga berkaitan dengan keseimbangan cakupan wilayah, terutama wilayah daerah (Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014). Bentuk penerapan prinsip keseimbangan dapat diidentifikasi melalui narasumber berita dan pemilihan area berita yang dilihat melalui isi berita (Nazaruddin, 2007; Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014).

Prinsip kontrol dan advokasi, yaitu jurnalisme memiliki peran penting dalam sistem peringatan dini bencana (Nazaruddin, 2007). Pada fase prabencana, komunikasi mengarah pada upaya mitigasi dan berperan sebagai *alarm* bagi

masyarakat (Reynolds & Quinn, 2008). Peran tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada fase prabencana. Penyediaan informasi mengenai bahaya dan ancaman yang tidak proporsional, dapat membuat masyarakat panik dan memproteksi diri mereka secara berlebihan (Vemula & Gavaravarapu, 2016). Bentuk penerapan prinsip kontrol dan advokasi pada hasil pemberitaan COVID-19, diidentifikasi melalui aspek isi berita (Nazaruddin, 2007).

Selanjutnya, prinsip lingkungan dan pembangunan, yaitu melihat sesuatu di balik “bencana” dengan melihat potensi-potensi berita yang dapat muncul dan menganalisis faktor pengurangan risiko, termasuk pengaruh aspek kerentanan terhadap dampak bencana. Prinsip lingkungan dan pembangunan penting untuk diterapkan karena kerentanan masyarakat yang dihadapkan dengan bahaya bencana dapat meningkatkan dampak bencana (Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014). Bentuk penerapan prinsip lingkungan dan pembangunan pada hasil berita dapat diidentifikasi melalui isi berita dengan melihat informasi yang terdapat pada teks berita (Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014).

Prinsip jurnalisme bencana terakhir adalah prinsip tindak lanjut. Prinsip tindak lanjut berarti hasil berita disajikan secara yang berkesinambungan. Tindak lanjut diperlukan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan terhadap suatu peristiwa bencana (Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014). Prinsip tindak lanjut berkaitan dengan prinsip kontrol dan advokasi, berarti jurnalisme memberitakan bencana secara konsisten dan terus menerus sepanjang masalah-masalah penting yang timbul akibat bencana masih berlangsung (Nazaruddin,

2007). Bentuk penerapan prinsip tindak lanjut dapat dilihat dari isi berita dengan mencermati informasi pada teks berita yang menunjukkan kesinambungan dengan berita sebelumnya (Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014).

Berdasarkan kerangka konsep yang dipaparkan, maka operasionalisasi konsep dirumuskan dalam tabel berikut:

TABEL 4
Operasionalisasi Konsep

Sub Unit Analisis	Unit Kategori	Operasionalisasi	Aspek berita
Prinsip akurasi	Pemilihan narasumber berita	Pemilihan narasumber berita dapat diidentifikasi dari teks berita, dapat berupa nama, peran, dan/atau jabatan. Narasumber yang muncul dalam berita bencana, misalnya pemerintah, ahli, masyarakat, dan pihak lainnya yang menjadi narasumber berita (Nazaruddin, 2007).	Narasumber
	Perubahan fakta dan data	Perubahan fakta dan data diidentifikasi dengan melihat informasi di dalam isi teks berita yang mengandung unsur perubahan fakta dan data dari pemberitaan sebelumnya (Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014).	Isi berita
	Kesesuaian pemilihan kata	Kesesuaian pemilihan kata diidentifikasi dengan mencermati kata-kata spesifik yang berkaitan dengan pandemi. Kata-kata yang berkaitan dengan bencana pandemi, yaitu patogen,	Pemilihan kata

		transmisi, vaksin, suspek, dan kata-kata lainnya yang memiliki kaitan dengan pandemi (Jamison et al., 2017).	
	Kesesuaian visualisasi	Kesesuaian visualisasi dilihat dari visualisasi yang ditampilkan dan isi berita. Visualisasi, yaitu foto mengenai berita yang diangkat, foto narasumber berita, ilustrasi, dan/atau grafik yang digunakan untuk mendukung isi berita (Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014).	Visualisasi
Prinsip keseimbangan	Jumlah narasumber berita	Jumlah narasumber berita diidentifikasi dari teks berita, seperti terdapat satu, dua, atau lebih pihak yang menjadi narasumber dalam satu berita (Nazaruddin, 2007; Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014).	Narasumber
	Pemilihan area berita	Pemilihan area berita diidentifikasi dari teks berita dengan mencermati lokasi berita. Lokasi berita yaitu kota yang menjadi lokasi dari berita yang diangkat, seperti Jakarta, Makassar, Ambon, Denpasar, dan lainnya (Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014).	Isi berita
Prinsip kontrol dan advokasi	Ketersediaan informasi pada berita	Ketersediaan informasi diidentifikasi dengan mencermati isi berita.	Isi berita
Prinsip lingkungan dan pembangunan	Ketersediaan informasi pada berita	Informasi dapat berupa nasihat, penjelasan kondisi, langkah yang perlu dilakukan bila	

Prinsip tindak lanjut	Ketersediaan informasi pada berita	bencana terjadi, bahaya bencana, kerentanan masyarakat, dan lainnya (Prajarto, 2008; Seeds Technical Service-Knowledge Links, 2014).	
-----------------------	------------------------------------	--	--

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena berusaha mendeskripsikan penerapan prinsip jurnalisme bencana pada pemberitaan COVID-19 di *Kompas.com*. Arikunto (dalam Syarah et al., 2020) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif karena berusaha menggambarkan data dengan kata-kata yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan prinsip jurnalisme bencana tanpa memerlukan data kuantitatif untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif. Sebagai metode primer, analisis isi kualitatif digunakan untuk menganalisis isi media, seperti berita, film, dan dokumen sejarah (Roller, 2019). Analisis isi kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena, bukan membuat generalisasi dari sampel populasi berdasarkan inferensi statistik (Forman & Damschroder, 2015). Selain itu, menurut Wimmer dan Dominick (dalam Subiako, 2017), metode analisis isi dapat

digunakan untuk menggambarkan isi komunikasi. Oleh karena itu, metode analisis isi kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Analisis isi kualitatif juga memperbolehkan peneliti memahami teks melalui pengelompokan kata-kata yang memiliki makna yang sama ke dalam kategori-kategori, yang pada akhirnya membangun sebuah sistem kontekstual (Elo & Kyngäs, 2008). Peneliti berperan menghasilkan kode dari data penelitian, bukan mengumpulkan data dengan wawancara, diskusi kelompok, atau pengamatan. Roller (2019) juga berpendapat bahwa penelitian yang menggunakan metode analisis isi kualitatif tidak fokus pada proses pembuatan konten. Dengan demikian, penelitian ini tidak memerlukan wawancara dengan narasumber karena fokus pada konten atau isi berita di media daring.

Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menentukan kategori, yaitu: berdasarkan klasifikasi informasi pada setiap fase bencana oleh Wukich (2016) dan kategori-kategori yang muncul secara induktif pada proses analisis data (Fraenkel et al., 2011). Penerapan prinsip jurnalisme bencana dalam penelitian ini, dipahami sebagai praktik jurnalisme bencana oleh *Kompas.com* yang tampak melalui kategori dan tema pada pemberitaan COVID-19 periode 2 Februari – 2 Maret 2020. Melalui kategori dan tema yang ditemukan, peneliti mengidentifikasi penerapan prinsip jurnalisme bencana di dalamnya berdasarkan kerangka teori dan konsep jurnalisme bencana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimulai dengan aktivitas dokumentasi berita dari *Kompas.com* berupa berita-berita COVID-19 yang dipublikasikan pada periode 2 Februari hingga 2 Maret 2020. Peneliti menggunakan kata kunci “virus corona” untuk mencari berita pada laman *Kompas.com*. Kata kunci tersebut dipilih karena penetapan nama resmi “COVID-19” baru dilakukan pada 11 Februari 2020 sehingga berita-berita yang diterbitkan sebelumnya belum menggunakan istilah tersebut. Namun, kata kunci “virus corona” pada berita-berita yang terbit pada 2 hingga 11 Februari tetap merujuk pada penyakit yang sama, yaitu “COVID-19”. Sebanyak 1864 berita dengan kata kunci “virus corona” ditemukan di semua kategori berita *Kompas.com*.

Proses pengumpulan data selanjutnya, yaitu penentuan sampel berita yang menjadi subjek penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk mendapatkan hasil analisis yang kaya, penelitian ini menggunakan kriteria penentuan sampel penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (dikutip dari Macnamara, 2005) yaitu:

- a) Memilih contoh yang tampak khas atau representatif.
- b) Memilih contoh yang bersifat negatif atau kontras.
- c) Memilih contoh yang tidak biasa atau berbeda.

Pemilihan kombinasi antara ketiga kriteria penentuan sampel tersebut, menurut Miles dan Huberman (dalam Macnamara, 2005), dapat mengidentifikasi berbagai pandangan, termasuk pandangan yang bertentangan, dan membantu

mengeksplorasi batas-batas pada data penelitian. Berdasarkan kriteria penentuan sampel tersebut, peneliti memilih 30 berita COVID-19 di *Kompas.com* dari setiap hari dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 2 Februari hingga 2 Maret 2020. Pemilihan berita ditentukan dengan mencermati judul berita COVID-19 di *Kompas.com* pada periode yang telah ditentukan, dan memiliki salah satu dari ketiga kriteria yang telah dipaparkan.

Pengumpulan data selanjutnya yaitu pengkodean dengan bantuan lembar pengkodean terhadap berita-berita COVID-19 di *Kompas.com* periode 2 Februari – 2 Maret 2020 yang telah dipilih berdasarkan aspek berita yang menunjukkan penerapan prinsip jurnalisme bencana. Jumlah berita yang dipilih, dapat ditambahkan jika belum mencapai saturasi data. Saturasi data didefinisikan sebagai suatu titik ketika tidak ada lagi informasi atau tema baru yang ditemukan pada proses pengumpulan data (Faulkner & Trotter, 2017).

4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

TABEL 5
Ringkasan Teknik Analisis

Tahapan	Aktivitas dan hasil
Tahap 1: membiasakan diri dengan data dan mengidentifikasi materi penting di dalam data	Membaca berita yang dipilih secara berulang hingga memahami isi setiap berita dan mencatat poin-poin penting pada setiap berita.
Tahap 2: menghasilkan kode awal	Menghasilkan kode awal. Ditemukan sejumlah 75 kode pada aspek narasumber, 31 kode pada aspek visualisasi, 102 kode pada aspek pemilihan kata, dan 313 kode aspek isi berita. Hasil pengkodean awal direkap ke dalam lampiran rekap kode awal.
Tahap 3: mencari tema	Tahap ini meliputi pengecekan kode awal,

	<p>menyingkirkan kode yang kurang relevan, memilih, dan mengelompokkan kode yang berpotensi membentuk sebuah tema. Berdasarkan proses tersebut, ditentukan 45 kode pada aspek narasumber, 31 kode pada aspek visualisasi, 87 kode pada aspek pemilihan kata, dan 215 kode pada aspek isi berita. Kode tersebut dirangkum dalam lampiran tabel pengelompokan kode.</p>
Tahap 4: meninjau potensi tema	Peneliti meninjau kembali kategori dan tema yang ditentukan pada tahap sebelumnya.
Tahap 5: menentukan dan memberi nama tema	<p>Kode-kode yang telah dipilih, dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi berita: <ol style="list-style-type: none"> a. Tiga (3) kategori area pemberitaan, yaitu: nasional, regional, dan internasional b. Tujuh (7) tema pemberitaan, yaitu: Informasi Situasional, Dampak Bahaya, Operasi, Perdebatan, Saran dan Edukasi, dan Religiositas. 2. Narasumber: tiga (3) kategori narasumber, yaitu: narasumber pemerintah, narasumber ahli, dan narasumber awam. 3. Pemilihan kata: tiga (3) kategori pemilihan kata, yaitu: istilah medis, istilah kebencanaan, dan istilah umum. 4. Visualisasi: tiga (3) kategori visualisasi, yaitu: foto situasi, foto narasumber, dan ilustrasi. <p>Pemetaan tema dan kategori tersebut dipaparkan pada tabel 4-7 di BAB III.</p>
Tahap 6: menghasilkan laporan	Laporan disajikan secara naratif dan menggunakan tabel. Analisis dikembangkan sesuai dengan kerangka teori.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan teknik *thematic analysis*. *Thematic analysis* digunakan untuk menjawab rumusan

permasalahan penelitian. Proses pengkodean dilakukan secara induktif dengan bantuan pengkodean dan tabel unit analisis berdasarkan operasionalisasi konsep penelitian. Braun & Clarke (2006, 2012) memaparkan enam langkah *thematic analysis*, yaitu: (1) membiasakan diri dan mengidentifikasi materi penting dalam data, (2) menghasilkan kode awal, (3) mencari tema, (4) meninjau potensi tema, (5) menentukan dan memberi nama tema, dan (6) menghasilkan laporan.

Langkah pertama, yaitu membiasakan diri dengan data dan mengidentifikasi materi penting di dalam data. Pengumpulan data dimulai dengan membaca 30 sampel berita secara berulang hingga peneliti memahami isi setiap berita. Pada tahap ini, peneliti mencatat poin-poin penting dalam setiap berita dan menandai bagian yang dianggap penting sebagai referensi pada tahap selanjutnya. Langkah kedua, peneliti menghasilkan kode awal. Menurut Braun & Clarke (2012) kode merupakan label yang mengidentifikasi bagian data yang berpotensi relevan bagi rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan kode yang bersifat deskriptif untuk menyesuaikan tujuan penelitian.

Peneliti menghasilkan kode awal dengan bantuan lembar pengkodean dan tabel unit analisis. Peneliti menggunakan kata kunci yang digunakan sebagai petunjuk dalam menghasilkan kode awal. Aspek-aspek berita yang menjadi fokus dalam langkah pengkodean, yaitu aspek narasumber, yang terdiri pihak dan jumlah narasumber dalam satu berita, pemilihan kata yang menjelaskan pandemi, visualisasi di dalam berita, isi berita, berupa informasi yang disediakan di dalam berita dan pemilihan area berita. Tabel unit analisis digunakan untuk menjelaskan

tema pemberitaan dan mendeskripsikan bentuk penerapan prinsip jurnalisme bencana berita COVID-19 di Kompas.com periode 2 Februari hingga 2 Maret 2020.

Pengkodean awal dilakukan pada 6 hingga 12 Oktober 2020. Pengkodean terhadap berita 1-10 dilakukan pada 6 Oktober 2020, sedangkan berita 11-30 dilakukan pada 12 Oktober 2020. Pada pengkodean awal, ditemukan sebanyak 75 kode pada aspek narasumber, 31 kode pada aspek visualisasi, 105 kode pada aspek pemilihan kata, dan 313 kode aspek isi berita. Hasil pengkodean awal direkap ke dalam tabel 1. Proses pengkodean yang dilakukan mencapai saturasi data, artinya tidak ada lagi informasi baru yang ditemukan selama proses berlangsung sehingga jumlah sampel berita tetap pada jumlah awal, yaitu 30 berita.

Langkah selanjutnya, yaitu mencari kategori dan tema. Setelah menghasilkan kode awal, peneliti mencari kategori dan tema dari hasil pengkodean. Kategori dan tema mencakup sesuatu yang penting dari keseluruhan data dan berkaitan dengan tujuan penelitian. Tema juga dapat merepresentasikan pola tertentu di dalam keseluruhan data penelitian. Sebuah tema ditentukan jika relevan dengan tujuan penelitian, bukan berdasarkan frekuensi kemunculannya (Braun & Clarke, 2006).

Tahap ketiga tersebut meliputi pengecekan kode awal, menyingkirkan kode yang kurang relevan, memilih, dan mengelompokkan kode yang berpotensi membentuk sebuah tema (Braun & Clarke, 2006, 2012). Setelah melakukan pengecekan kode, peneliti mengelompokkan kode yang berpotensi membentuk tema pemberitaan. Pengelompokkan kode merujuk pada klasifikasi informasi pada setiap fase bencana oleh Wukich (2016) dan berdasarkan kode yang muncul secara

induktif pada proses analisis data. Langkah ini memudahkan peneliti dalam menentukan dan menetapkan tema pemberitaan, cakupan tema, dan pembahasan setiap tema pemberitaan.

Langkah selanjutnya, peneliti memeriksa kembali hasil pengelompokan kode. Peneliti meninjau kembali tema-tema yang ditemukan dan dipastikan memiliki batas yang jelas, memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan membentuk penjelasan koheren (Braun & Clarke, 2012). Tahap selanjutnya, peneliti memberikan nama pada tema-tema yang telah diperiksa. Nama tema memberikan gambaran secara jelas dan spesifik mengenai setiap tema. Nama tema yang baik bersifat informatif, ringkas, dan mudah diingat (Braun & Clarke, 2012).

Pengelompokan kode dimulai pada 4 November 2020 dan ditentukan sebanyak tiga (3) kategori narasumber, yaitu: narasumber pemerintah, narasumber ahli, dan narasumber awam, tiga (3) kategori visualisasi, yaitu: foto situasi, foto narasumber, dan ilustrasi, dan tiga (3) kategori pemilihan kata, yaitu: istilah medis, istilah kebencanaan, dan istilah umum. Sementara itu, aspek isi berita dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu area pemberitaan yang meliputi: nasional, regional, dan internasional dan tujuh (7) tema pemberitaan, yaitu: Informasi Situasional, Dampak Bahaya, Operasi, Perdebatan, Saran dan Edukasi, dan Religiositas.

Pada tahap ini, peneliti juga mengembangkan analisis dari setiap tema yang ditemukan, dimulai dengan menjelaskan tema pemberitaan dan memberikan contoh-contoh spesifik dari tema tersebut. Tema pemberitaan yang dijelaskan, kemudian dieksplorasi bentuk penerapan prinsip jurnalisme bencananya sesuai dengan tujuan penelitian. Prinsip jurnalisme bencana yang muncul dalam hasil

berita, yaitu prinsip akurasi, prinsip keseimbangan, prinsip kontrol, advokasi, prinsip lingkungan, pembangunan, dan prinsip tindak lanjut. Penjelasan temuan kategori dan tema pemberitaan, analisis data, dan interpretasi data dipaparkan dalam BAB III.

5. Uji Keabsahan Data

Lincoln & Guba (dalam Morse et al., 2002) mengemukakan kriteria dalam penelitian kualitatif yang memastikan keabsahan data (*trustworthiness*), yaitu kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Lincoln & Guba (dalam Morse et al., 2002) merekomendasikan sejumlah strategi yang digunakan untuk memperoleh keabsahan data, seperti *negative cases*, *peer debriefing*, menerapkan waktu yang relatif lama, jejak audit, dan pemeriksaan anggota.

Penelitian ini menggunakan *peer debriefing* untuk menguji keabsahan data penelitian. *Peer debriefing* memungkinkan seseorang yang memenuhi syarat untuk meninjau dan menilai data penelitian, kategori yang muncul dari data tersebut, dan tema atau temuan akhir dari sebuah penelitian. Pihak tersebut juga dapat menilai hasil temuan peneliti jika terdapat pokok penting yang terlewat, terlalu menekankan sebuah argumen, atau selalu mengulanginya (Janesick, 2015). Oleh karena itu, uji keabsahan dengan *peer debriefing* memungkinkan untuk diterapkan pada penelitian ini.